

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementas Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta PT Bumi Aksara
- Abdurrahmat, Fathoni. 2021. Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Akadun. 2016. Teknologi Informasi Administrasi, Bandung, Alfabeta
- Alamsyah, Kamal. 2015. Administrasi Publik Dalam Prespektif Teori dan Praktek. Bandung: Ceplas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
- Aprianty, Diah Rachma. 2016. Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota samarinda. Ejournal ilmu pemerintahan, 2016, 4 (4): 1589-1602 issn 2477-2458. ([https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Diah%20Rachma%20Aprianty%20\(10-21-16-02-17-44\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Diah%20Rachma%20Aprianty%20(10-21-16-02-17-44).pdf))
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmadilaga, Didi. 2014. Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi. Bandung: Pionir Jaya
- Dhillon, 2020. Democracy and Public Policy, in Encylopedia of Public Administration and Public Policy, Boca Raton, Taylor & Francis Group
- Dr. Hadi Prabowo, Dr. Dadang Suwanda dan Prof. Dr. Wirman Syafr, 2022. Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William. 2016. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke 2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fernanda, Desi. 2016. Etika Organisasi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

- Harsono, Hanifah. 2016. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widaya
- Indrajit, Richardus Eko. 2015. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Digital Government.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, Data Pokok Desa/ Kelurahan Tahun 2022 ([https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_grid\\_t01/](https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/))
- Kotler, Philip. 2021. Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Kontrol. Jakarta: PT. Prehallindo
- Nawawi, Ismail. 2015. Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy, Edisi ke 5. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 9(3), 130-139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Purwanto, Erwan Agus. 2020. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Setiawan, Guntur. 2014. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Setyoko, Israwan. 2018. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung: Alqa Prisma Interdelta Jatinangor
- Siagian, Sondang. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Siregar, Bakri. 2017. *Metode Riset Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sutopo dan Suryanto, Adi. 2019. *Pelayanan Prima Edisi ke 3*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum 2023. *Inovasi Pelayanan Publik. Cetakan Pertama*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras (Citila).
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2020. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Teori dan Proses. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Diah Rachma Aprianty. 2016. *Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Yusuf Wiranto. 2022. *Dampak Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Xenia Papadomichelaki and Gregoris Mentzas, "eGovQual: A multiple- item scale for assessing e-government service quality," Elsevier, pp. 98-109, 2011

## **2. Jurnal Ilmiah**

- Aprianty, Diah Rachma. 2016. *Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota samarinda*. *Ejournal ilmu pemerintahan*, 2016, 4 (4): 1589-1602 issn 2477-2458.

Diah Rachma Aprianty. 2016. Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 9 (3), 130-139

Yusuf Wiranto. 2022. Dampak Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

### **3. Dokumen**

Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

### **4. Website**

[https://www.researchgate.net/publication/329922686\\_Skala\\_Pengukuran\\_dan\\_Jumlah\\_Respon\\_Skala\\_Likert](https://www.researchgate.net/publication/329922686_Skala_Pengukuran_dan_Jumlah_Respon_Skala_Likert), 2022

<https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>